TANTANGAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DAERAH PINGGIRAN

I Made Adikampana
Fakultas Pariwisata Universitas Udayana
Surel: adikampana@gmail.com

ABSTRACT

The development of tourism in peripheral areas is seen as a product diversification in the tourism destination and an appropriate strategy for developing the peripheral areas itself. Tourism is considered to address the main issues of development in peripheral areas, themselves particularly unemployment and urbanization. However, there are challenges of tourism development in peripheral areas due to the relationship with the center of tourism development areas.

Based on the case of tourism development in "Taman Nasional Bali Barat" *(TNBB), this article examines the challenges of tourism development in peripheral areas. The examination showed that tourism in TNBB has a dependence on the center of tourism development in Bali. This is shown that the economic impact of tourism in TNBB toward local community has not been significant. Tourism in TNBB have not been able to diversify the economic based of local community, so that the surrounding communities in TNBB still depends on the utilization of natural resources in the conservation area.*

Keywords: tourism, peripheral areas, dependency, ecomomic impact

I. PENDAHULUAN

Daerah pinggiran dapat ditemukenali dalam suatu wilayah, negara, benua, maupun juga dalam skala global. Daerah pinggiran umumnya berada pada lokasi yang tidak menguntungkan, karena jauh dari populasi, pusat ekonomi, dan perjalanan ke lokasi tersebut membutuhkan waktu dan biaya yang relatif besar (Nash dan Martin, 2003). Daerah pinggiran secara ekonomi mengalami marjinalisasi yang disebabkan oleh keterbatasan pasar lokal dan kebocoran ekonomi (Brown dan Hall, 2000; Blackman et al., 2004). Sebagian besar daerah pinggiran mempunyai karakter perdesaan, yang sering dihubungkan dengan rendahnya upah dalam sektor pertanian, depopulasi, dan terbatasnya investasi lokal (Buhalis, 1999; Kauppila et al., 2009). Selain itu, daerah pinggiran juga mempunyai kelemahan dalam posisi tawar perpolitikan, karena berjarak dengan pusat kekuasaan dan pemerintahan (Blackman et al., 2004). Dapat dikatakan begitu banyaknya ketidakberdayaan daerah pinggiran, baik dalam dimensi ekonomi, sosial, maupun politik. Namun dibalik itu semua daerah pinggiran mempunyai keunggulan daya tarik yang luar biasa bagi wisatawan, karena daerah-daerah tersebut relatif masih asli, memberikan pengalaman yang berbeda, dan belum sepenuhnya tereksploitasi (Brown dan Hall, 2000; Muller & Jansson, 2007).

Selama ini pengembangan pariwisata di daerah pinggiran selain untuk diversifikasi produk suatu destinasi pariwisata, juga dipandang sebagai instrumen pembangunan yang tepat bagi daerah pinggiran itu sendiri (Hall dan Jenkins, 1998; Moscardo, 2005). Dalam level regional dan nasional, pengembangan pariwisata dipandang mampu untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan antar pusat dan pinggiran. Meskipun demikian pariwisata tidak secara otomatis dapat mengurangi tingkat kesenjangan, karena berbagai dampak negatif juga dapat muncul dalam pengembangan pariwisata di daerah

pinggiran. Sementara pada tingkat lokal, pengembangan pariwisata digunakan untuk mengontrol perubahan karakter kelokalan dan membuka peluang keragaman basis ekonomi daerah pinggiran terutamanya di perdesaan (Cawley dan Gillmor, 2008). Pariwisata di daerah pinggiran diyakini mampu memecahkan isu utama pembangunan daerah periperal yaitu pengangguran dan migrasi keluar (urbanisasi) untuk mendapatkan penghidupan dan pekerjaan. Dengan mengambil kasus pengembangan pariwisata alam di Taman Nasional Bali Barat, artikel ini akan mengulas tantangan pengembangan pariwisata di daerah pinggiran sebagai bagian dari optimalisasi pengaruh ekonomi pariwisata bagi masyarakat di daerah pinggiran.

II. KARAKTERISTIK PARIWISATA DI DAERAH PINGGIRAN

Permasalahan di daerah pinggiran muncul karena adanya hubungan atau relasi dengan pusat terutama kutub pertumbuhan ekonomi (*core-periphery*). Berdasarkan teori ketergantungan (dependensi), relasi tersebut cenderung memperlihatkan dominasi dan eksploitasi pusat terhadap daerah pinggiran (Jordan, 2004). Dalam konteks ini pertumbuhan ekonomi di daerah pusat bersumber dari ekstraksi kegiatan di daerah pinggiran. Teori dependensi menunjukkan bahwa eksploi-tasi terhadap daerah pinggiran mengakibatkan minimnya pertumbuhan dan perkembangan daerah tersebut, sehingga daerah pinggiran akan tetap dan cenderung semakin terbelakang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterbelakangan daerah pinggiran bukan disebabkan oleh karakteristik daerah tersebut, melainkan karena adanya ketidaksetaraan hubungan antara pusat dan pinggiran (Chaperon dan Bramwell, 2013). Interpretasi tersebut menekankan bahwa ketertinggalan daerah pinggiran lebih disebabkan oleh faktor eksternal dan ekonomi daripada dimensi sosial, budaya, lingkungan, ataupun politik.

Teori dependensi telah banyak juga digunakan untuk membedah permasalahan atau isu-isu pembangunan pariwisata pusat dan pinggiran, terutama dalam mencermati hubungan antara pertanian dengan kawasan pariwisata berskala besar tertutup (*enclave tourism resort*). Terkait dengan hal tersebut, muncul suatu istilah dalam pengembangan pariwisata di daerah pinggiran yaitu ”*pleasure periphery*”, dimana daerah pinggiran digerakkan oleh daerah pusat untuk pengembangan pariwisata (Turner dan Ash, 1975 dalam Chaperon dan Bramwell, 2013). Selanjutnya Briton (1982) menggunakan teori dependensi untuk memahami kaitan pusat dan pinggiran dalam pembangunan pariwisata. Briton berpendapat bahwa pengembangan pariwisata di daerah pinggiran berlaku praktek-praktek kolonialisme dan kapitalisme yang lebih menguntungkan daerah pusat pariwisata. Selanjutnya pengembangan *enclave tourism resort* di daerah pinggiran mempunyai keterhubungan dengan modal global namun sangat minim keterpaduan dengan ekonomi lokal. Kondisi ini menyebabkan daerah pinggiran semakin tergantung terhadap pusat dan akhirnya memperburuk ketidaksetaraan struktural antara pusat dan pinggiran (Bianchi, 2002). Ketergantungan pinggiran terhadap pusat semakin nyata terlihat ketika kemudian pengambilan keputusan pengambangan pariwisata di daerah pinggiran seringkali dibuat di daerah pusat atau bersifat sentralistis (Weaver, 1998 dalam Chaperon dan Bramwell, 2013).

Namun penggunaan teori dependensi dalam mengkaji fenomena pembangunan pariwisata tidak lepas juga dari kritikan. Salah satu kritikan menyebutkan bahwa pengembangan pariwisata di daerah pinggiran tidak sepenuhnya dikontrol oleh kekuatan besar dari luar (pusat). Hal ini dijustifikasi oleh pernyataan bahwa pariwisata di daerah pinggiran dikembangkan dengan skala kecil, dimiliki oleh masyarakat lokal, dan lebih banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik (Oppermann, 1993; Scheyvens & Momsen, 2008). Kemajuan teknologi informasi juga disebutkan dapat mengurangi ketergantu-

ngan pinggiran terhadap pusat, karena internet dalam hal ini dapat memberikan akses langsung ke konsumen. Keadaan tersebut semakin merangsang pertumbuhan pariwisata berskala kecil di daerah pinggiran yang kepemilikan dan pengelolaannya sepenuhnya oleh masyarakat lokal (Chaperon dan Bramwell, 2013).

Terlepas dari pro dan kontra terhadap teori dependensi, tidak dapat dipungkiri bahwa kerangka pikir ketergantungan dalam teori tersebut dapat memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan dalam pengembangan pariwisata di daerah pinggiran. Pemahaman ini dapat menentukan bentuk intervensi atau kontrol eksternal yang diperlukan agar daerah pinggiran tidak selalu didominasi dan dieksploitasi (Chaperon dan Bramwell, 2013). Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal di daerah pinggiran dalam pengembangan pariwisata harus dipertimbangkan, karena masyarakat tersebut tidak selalu tergantung dan didominasi oleh kekuatan eksternal. Untuk itu penggunaan teori dependensi tidak hanya dicermati dari dimensi ekonomi semata, namun juga dipadupadankan dengan dimensi lainnya, baik sosial, budaya, lingkungan dan politik.

Berdasarkan uraian sebelumnya tentang pembangunan pariwisata di daerah pinggiran, dapat disebutkan bahwa pariwisata di daerah pinggiran mempunyai karakteristik dan juga tantangan sebagai berikut (Buhalis, 1999; Pearce, 2002 dalam Blackman et al., 2004):

- Pentingnya pengembangan pariwisata sebagai alternatif akibat menurunnya pertumbuhan industri tradisional yang bersifat ekstraktif di daerah-daerah pinggiran
- Nuansa wilayah perdesaan yang masih asli dan alami
- Potensi pasar yang terbatas
- Keterbatasan akses bagi wisatawan; keterbatasan dalam keterjangkauan terhadap produk pariwisata
- Musiman; mengalami konsentrasi kunjungan pada periode tertentu (*seasonality*)
- Didominasi oleh usaha skala kecil dan menengah
- Berpotensi memberikan dampak negatif terhadap masyarakat lokal dan lingkungan yang sensitif
- Terbatasnya kapasitas masyarakat lokal akibat tingkat pendidikan yang masih rendah dan miskin pengalaman.

Lebih lanjut Hall et al. (2013) menyebutkan bahwa pariwisata di daerah pinggiran mempunyai karakteristik yang dapat disebutkan sebagai berikut:

- Ekonomi wilayah yang masih sederhana yaitu berupa pemanfaatan sumber daya alam (pertanian, kehutanan, pertambangan)
- Memiliki keterbatasan dalam prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi
- Minim penyediaan fasilitas dan layanan publik oleh pemerintah, sehingga masyarakatnya cenderung melakukan migrasi keluar

Sebagai hasil dari karakteristik tersebut, pengembangan pariwisata di daerah pinggiran berjalan secara alamiah atau dapat dikatakan bahwa tidak ada perencanaan yang cermat (*well plan*) untuk dapat dijadikan panduan pelaksanaan program-program pengembangan pariwisata.

Tabel 1. Karakteristik Pariwisata di Daerah Pinggiran

Lokasi yang terpencil	Pariwisata di daerah pinggiran secara geografis berada jauh dari pasar. Ini menunjukkan adanya peningkatan biaya transportasi perjalanan wisata dan juga pembengkakan biaya komunikasi antara penyedia produk pariwisata dengan konsumennya.
Kurangnya kontrol politik dan ekonomi dalam pengambilan keputusan penting terkait dengan kesejahteraan masyarakat	Rentan terhadap dampak globalisasi dan restrukturisasi ekonomi yaitu perdagangan bebas, penghapusan tarif, dan sentralisasi keputusan politik dan ekonomi lainnya.
Mata rantai ekonomi	Keterhubungan ekonomi di daerah pinggiran begitu lemah, sehingga berpotensi membatasi efek pengganda akibat besarnya impor barang dan jasa.
Perpindahan penduduk/migrasi	Penduduk cenderung bermigrasi dari pinggiran ke pusat. Hal ini tidak hanya berdampak pada struktur penduduk, tapi juga terkait dengan terbatasnya modal sosial, budaya dan intelektual.
Inovasi	Daerah pinggiran mempunyai kelemahan dalam inovasi, akibat kecenderungan impor produk yang tinggi daripada dikembangkan secara lokal.
Intervensi pemerintah	Karena daerah pinggiran seringkali mengalami permasalahan ekonomi, maka intervensi pemerintah relatif sangat besar jika dibandingkan dengan daerah pusat.
Arus informasi	Arus informasi di dalam daerah pinggiran dan ke pusat lebih lemah jika dibandingkan dengan arus informasi dari pusat ke pinggiran. Arus informasi tersebut memiliki implikasi terhadap pengambilan keputusan politik dan ekonomi di daerah pusat.
Nilai estetika	Nilai estetik daerah pinggiran lebih terjaga bila dibandingkan dengan pusat. Nilai tersebut merupakan potensi utama dalam pengembangan pariwisata alam dan *second home*.

Sumber: Hall and Boyd 2005; Hall 2007; Muller and Jansson 2007 dalam Hall et al., 2013

III. TANTANGAN PARIWISATA DAERAH PINGGIRAN; Kasus pengembangan pariwisata alam di Taman Nasional Bali Barat

Pariwisata alam di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) telah berkembang sejak tahun 80-an. Tujuan pengembangan pariwisata alam di kawasan TNBB adalah selain untuk melindungi keanekaragaman hayati, juga sebagai alat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik, peluang pekerjaan dan kesempatan berusaha. Namun kenyataanya, masyarakat sekitar TNBB mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam sebagai sumber penghidupannya (pemanfaatan ekstraktif). Ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam di dalam kawasan TNBB antara lain terlihat dari maraknya aksi penebangan kayu, perburuan satwa, penangkapan ikan, pembibitan tanaman, pemangkasan tajuk pohon untuk pakan ternak, serta area pengembalan liar. Di satu sisi hal tersebut memperlihatkan masih rendahnya kesadaran konservasi masyarakat guna mendukung fungsi kawasan sebagai potensi pengembangan pariwisata alam. Sedangkan di sisi lain menunjukan minimnya

kesempatan untuk mendapatkan manfaat keberadaan pariwisata alam dan sektor lain yang terkait. Menurut Campbell (1999) permasalahan tersebut akibat dari kesulitan yang dialami masyarakat lokal dalam mengidentifikasi peluang pekerjaan dan investasi yang dibangkitkan oleh industri pariwisata.

A. Pengembangan *Enclave Resort* di TNBB

Saat ini di dalam kawasan TNBB terdapat 3 (tiga) pengusahaan pariwisata alam (PPA) yaitu PT. Trimbawan Swastama Sejati, PT. Shorea Barito Wisata, dan PT. Disthi Kumala Bahari. Pengusahaan pariwisata alam (PPA) adalah suatu kegiatan untuk menyeleng-garakan usaha sarana pariwisata di zona pemanfaatan suatu kawasan taman nasional, taman hutan raya, atau taman wisata alam, berdasarkan rencana pengelolaan (Peraturan Pemerintah RI. No. 18 Tahun 1994). Pengembangan usaha pariwisata alam tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip pemanfaatan taman nasional, yaitu konservasi, edukasi, ekonomi, partisipasi masyarakat, rekreasi dan pariwisata. Salah satu PPA yang cukup berkembang di kawasan Taman Nasional Bali Barat adalah PT. Shorea Barito Wisata.

Areal PPA PT. Shorea Barito Wisata terletak di tiga blok pemanfaatan, yaitu Gilimanuk, Tanjung Kotal dan Labuan Lalang. Dari ketiga blok tersebut, Tanjung Kotal dan Labuan Lalang telah intensif dikembangkan sebagai sebuah resort yaitu Waka Shorea Resort, yang kemudian berganti nama menjadi Shorea Beach Resort.

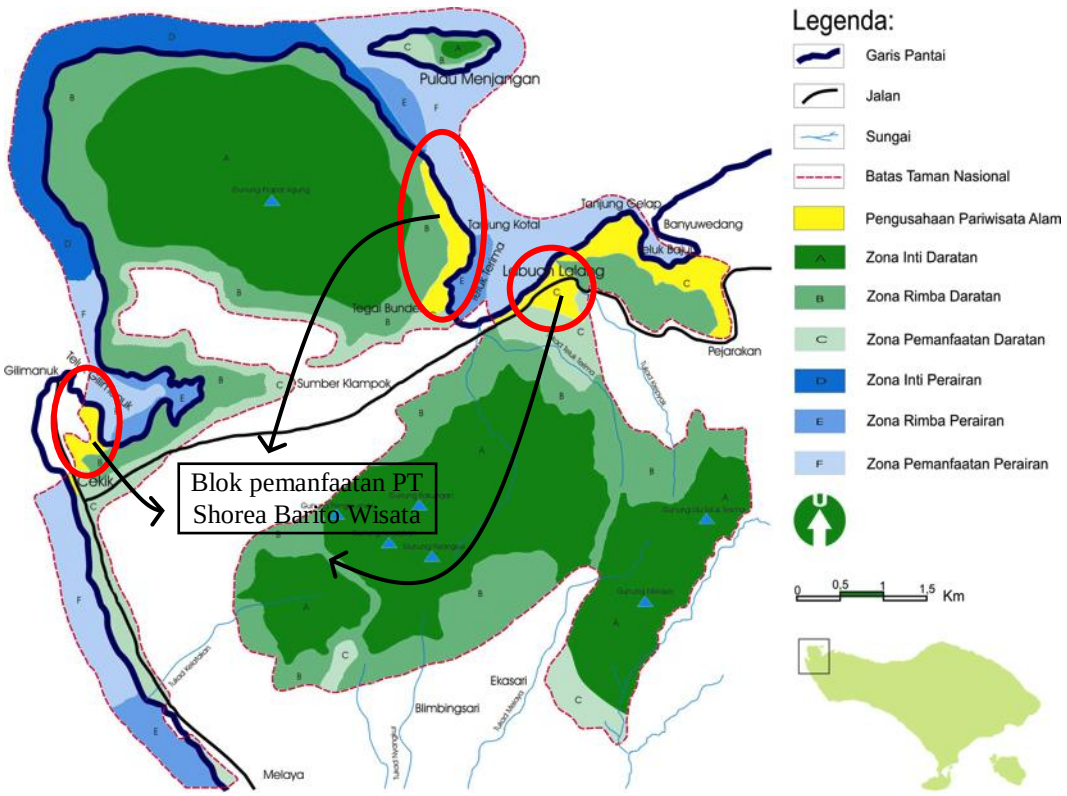

Gambar 1. Areal PPA PT. Shorea Barito Wisata
Sumber: Peta Zonasi Taman Nasional Bali Barat, 1996

Atraksi utama yang ditawarkan berupa *diving, snorkeling, sea kayaking, sun rise boating, village tour, cycling* dan *trekking*. Untuk mendukung aktivitas tersebut di dalam resort telah tersedia berbagai fasilitas di antaranya *visitor centre*, *bunga-low* dan *villa*, bar dan restoran, *recreation centre*, *jetty*, kolam renang, *shuttle bus*, *open stage* dan *gallery*, perpustakaan, *medical* dan *spa* (*rejuvenation centre*).

Pada tahun 2004, 65% wisatawan yang mengunjungi Waka Shorea Resort berasal dari Eropa, kemudian Asia (11%), Australia (10%), dan Amerika (8%). Adapun karakteristik pasar Waka Shorea Resort adalah (Adikampana, 2008):

- Rata-rata lama tinggal wisatawan 2 hari.
- Rata-rata tingkat hunian 19 %, dapat dikatakan rendah.
- Komposisi belanja terbesar wisatawan adalah untuk keperluan akomodasi, makanan dan minuman, atraksi wisata dan *spa*.

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan manajemen Shorea Beach Resort pada tahun 2013, komposisi belanja dan asal wisatawan tidak berubah (masih didominasi oleh pasar Eropa). Namun terjadi perubahan rata-rata lama tinggal dan tingkat hunian, meskipun tidak terlalu besar. Berikut adalah profil pasar Shorea Beach Resort:

- Rata-rata lama tinggal wisatawan 3 hari.
- Rata-rata tingkat hunian 23 %, dapat dikatakan masih rendah.
- Komposisi belanja terbesar wisatawan adalah untuk keperluan akomodasi, makanan dan minuman.

Dari kedua periode data pariwisata di resort tersebut, dapat disebutkan bahwa telah terjadi stagnasi perkembangan pada resort tersebut. Diduga kondisi ini disebabkan juga oleh keberadaan resort yang terletak di daerah pinggiran pariwisata Bali.

B. Pengaruh Ekonomi *Enclave Resort* di TNBB

Pengaruh ekonomi pariwisata adalah manfaat atau kontribusi kegiatan pariwisata terhadap ekonomi suatu wilayah atau masyarakat lokal (Frechtling, 1987). Kontribusi pariwisata terhadap ekonomi masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kontribusi primer dan kontribusi sekunder. Kedua bagian kontribusi ini berhubungan erat dengan pembelanjaan pengunjung yang besaran-nya ditentukan oleh lama tinggal di destinasi. Kontribusi primer adalah penerimaan langsung dari pembelanjaan pengunjung atas penyediaan barang dan jasa pariwisata. Sedangkan kontribusi sekunder yang kemudian dikenal dengan kontribusi tidak langsung dan ikutan, akan terjadi apabila penerima langsung pembelanjaan pengunjung tadi mengeluarkan kembali penerimaannya untuk barang dan jasa yang dibutuhkan. Demikian seterusnya sehingga menimbulkan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap ekonomi masyarakat lokal. Pada setiap urutan pembelanjaan, jumlah penerimaan yang dikeluarkan kembali akan lebih kecil dari pembelanjaan sebelumnya (*ripple effect*), karena sebagian dari penerimaan kemungkinan akan disimpan, untuk pembayaran pajak atau keluar dari wilayah untuk biaya impor. Besarnya penerimaan yang tidak disirkulasikan lagi dalam ekonomi masyarakat sering disebut dengan istilah *leakage* atau "kebocoran" (Murphy, 1985).

Berdasarkan lama tinggal dan tingkat hunian pasar Shorea Beach Resort (*enclave resort* di TNBB), dapat disebutkan bahwa pengembangan pariwisata TNBB belum signifikan dalam memberikan pengaruh ekonomi terutama bagi masyarakat lokal. Beberapa indikator yang dapat menjustifikasinya adalah:

- Kemampuan sektor pariwisata dalam memberikan kontribusi ekonomi sangat tergantung dari pembelanjaan pengunjung. Semakin besar pembelanjaan pengunjung semakin berarti pula kontribusi ekonomi yang

ditimbulkannya. Sedangkan pembelanjaan pengunjung ditentukan oleh lama tinggal di suatu destinasi wisata. Di TNBB, lama tinggal dapat dikatakan rendah, sehingga manfaat atau kontribusi pariwisata terutama di resort tersebut terbilang tidak optimal.

- Tingkat hunian resort pun juga dapat disebut cukup kecil. Kondisi tersebut menunjukkan sebagian besar wisatawan yang mengunjungi TNBB merupakan *one-day visitor* yang lebih memilih fasilitas akomodasi di luar TNBB (Badung dan Denpasar sebagai pusat pariwisata Bali). Padahal pembelanjaan terbesar wisatawan terletak di komponen akomodasi. Tentu saja hal ini juga yang menjadikan minimnya pengaruh ekonomi pariwisata TNBB.
- Kerena skala pengembangan yang dipilih adalah *enclave resort*, maka keterkaitan dan interaksi dengan masyarakat di sekitarnya tidaklah intensif. Hal ini tentu saja menutup peluang-peluang pekerjaan, usaha dan investasi masyarakat lokal terhadap keberadaan pariwisata alam TNBB, yang berakibat pada sulitnya masyarakat sekitar TNBB lepas dari ketergantungannya terhadap pemanfaatan ekstraktif sumber daya alam di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Bali Barat.

IV. PENUTUP

1. Pengembangan pariwisata di daerah pinggiran ditujukan untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan antar pusat dan pinggiran dan juga sebagai alat strategis untuk membuka peluang diversifikasi basis ekonomi bagi masyarakat, sehingga tidak hanya tergantung pada pemanfaatan ekstraktif sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.
2. Dalam pengembangan pariwisata di daerah pinggiran tidak lepas dari adanya tantangan, yaitu kuatnya intervensi eksternal dari pusat, khususnya kutub pertumbuhan pariwisata dan kondisi internal masyarakat dengan kapasitas yang masih lemah.
3. Dalam kasus pengembangan pariwisata alam TNBB sebagai daerah pinggiran, tantangan yang muncul berupa adanya ketergantungan terhadap pusat pariwisata Bali yang disebabkan oleh:
   - Keterbatasan pasar dan besarnya kebocoran pariwisata
   - Dominasi investasi luar
   - Minim keterpaduan dengan ekonomi lokal
   - Kapasitas masyarakat yang masih rendah
   - Pengambilan keputusan yang sentralistis
   - Kebijakan pemerintah yang tidak komprehensif, hanya mengakomodasi perspektif ekonomi dan mengabaikan dimensi sosial, budaya, dan lingkungan.
4. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang diharapkan dapat memberikan ruang-ruang bagi pariwisata berskala kecil di daerah pinggiran tidak tampak tumbuh dan berkembang di TNBB. Hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya keterbatasan sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar TNBB. Sehingga pemanfaatan ekstraktif masih menjadi andalan bagi ekonomi masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Adikampana, I Made, 2008, *Pengaruh Pariwisata Alam di Taman Nasional Bali Barat terhadap Peluang Pekerjaan Bagi Masyara-kat Lokal*, Jurnal Arsitektur & Perencanaan, 3, 36-42.

Blackman, A., Foster, F., Hyvonen, T., Jewell, B., Kuilboer, A., and Mascardo, G., 2004, *Factors Contributing to Successful Tourism Development in Peripheral Regions*, The Journal of Tourism Studies, 15, 59-70.

Bianchi, R., 2002, *Towards a new political economy of global tourism*, Dalam R.Sharpley & D. Telfer (Eds.), Tourism and development. Concepts and issues Channel View Publication, Clevedon.

Britton, S., 1982, *The political economy of tourism in the third world*, Annals of Tourism Research, 9, 331–358.

Brown, F. and Hall, D., 2000, *Tourism in peripheral areas: Case studies*, Channel View Publication, Clevedon.

Buhalis, D., 1999, *Tourism on the Greek islands: Issues of peripherality, competitiveness and development*, International Journal of Tourism Research, 1, 341–358.

Campbell, 1999, *Ecotourism in Rural Developing Communities*, Annals of Tourism Research, 26: 534-553.

Cawley, M and Gillmor, Desmond A., 2008, *Integrated Rural Tourism: Concepts and Practice*, Annals of Tourism Research, 35, 316-337.

Chaperon, S. and Bramwell, B., 2013, *Dependency And Agency In Peripheral Tourism Development*, Annals of Tourism Research, 40, 132-154.

Frechtling, Douglas C., 1987, *Assessing the Impacts of Travel and Tourism - Introduction to Travel Impact Estimation*. Dalam J.R. Brent Ritchie and Charles R.Goeldner (eds.) Travel, Tourism and Hospitality Research, John Wiley & Sons, Chichester.

Hall, C. M. and Jenkins, J. M., 1998, *The policy dimensions of rural tourism and recreation*, Dalam R. W. Butler, C. M. Hall, & J. Jenkins (Eds.), Tourism and Recreation in Rural Areas, John Wiley & Sons, Chichester.

Hall, C. M., Harrison, D., Weaver, D., and Wall, G., 2013, *Vanishing Peripheries: Does Tourism Consume Places?*, Tourism Recreation Research, 38, 71-92.

Jordan, L. A., 2004, Institutional arrangements for tourism in small twin-island states of the Caribbean, Dalam D. Duval (Ed.), Tourism in the Caribbean; trends, development, prospects, Routledge, London.

Kauppila, P., Saarinen, J., and Leinonen, R., 2009, *Sustainable Tourism Planning and Regional Development in Peripheries: A Nordic View*, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 4, 424–435.

Moscardo, G., 2005, *Peripheral tourism development: Challenges, issues and success factors*, Tourism Recreation Research, 30, 27–43.

Muller, D. and Jansson, B., 2007, *The Difficult Business of Making Pleasure Peripheries Prosperous: Perspectives on Space, Place and Environment*, Dalam Muller, D. and Jansson, B. (Eds) Tourism in Peripheries: Perspectives from the Far North and South, CABI, Wallingford.

Murphy, Peter E., 1985, *Tourism A Community Approach*, Methuen, New York.

Nash, R. and Martin, A., 2003, *Tourism in peripheral areas-The challenges for Northeast Scotland*, International Journal of Tourism Research, 5, 161–181.

Oppermann, M., 1993, *Tourism space in developing countries*, Annals of Tourism Research, 20, 535–556.

Peraturan Pemerintah RI. No. 18 Tahun 1994 tentang *Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam*, Jakarta, 21 April 1994.

Scheyvens, R. and Momsen, J., 2008, *Tourism in small island states: From vulnerability to strengths*, Journal of Sustainable Tourism, 16, 491–510.